

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Anambas Sebelum Pemekaran**

Dari beberapa sumber baik orang maupun dokumen yang ada tentang sejarah Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Ketika Sultan Al Muazam Syah beserta Tengku Besar Umar langsung dimakzulkan oleh kompeni Belanda pada tahun 1911 maka pada tahun 1913 dengan resmi Kesultanan Riau Lingga dibubarkan oleh penguasa Belanda dan bertepatan dengan itu berkumpul seluruh Datuk Kaya yang ada di Riau bertempat dikediaman residen (gedung sekarang) untuk menerima penjelasan-penjelasan dari penguasa Belanda. Penjelasan itu menyinggung tentang wilayah Pulau Tujuh yang mendapat perubahan pembagian wilayah yaitu:

1. Wilayah Datuk Kaya Pulau Bunguran dibagi dua wilayah yaitu, Bunguran Barat dan Bunguran Timur sedangkan Pulau Panjang sendiri;
2. Wilayah Datuk Kaya Lemaia dibagi dua yaitu wilayah Datuk Kaya

Pada fase berikutnya berdasarkan surat keputusan delegasi Republik Indonesia, propinsi Sumatra Tengah tanggal 18 Mei 1956 menggabungkan diri kedalam wilayah Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status sebagai daerah otonomi tingkat II yang dikepalai bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 (empat) Kawedanan sebagai berikut:

1. Kawedanan Tanjung pinang, meliputi Kecamatan Bintang Selatan (termasuk Bintang Timur, Galang, Tanjung Pinang Barat, dan Tanjung Pinang Timur);
2. Kawedanan Karimun, meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro;
3. Kawedanan Lingga, meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang;
4. Kawedanan Pulau Tujuh, Meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Kawedanan Pulau Tujuh yang membawahi Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur beserta kawedan lainnya dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 Nomor. UP/247/5/1965, berdasarkan ketetapan tersebut, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administrasi Kawedan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus

Pulau Tujuh yang terdiri dari Jemaja, Siantan, Tambelan, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Midai, Serasan kemudian dibawah oleh Kabupaten Kepulauan Riau sebagai Daerah Tingkat II. Pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 Natuna besar dan Natuna kecil beserta gugusan Kepulauan Anambas dimekarkan menjadi Kabupaten terpisah dari induknya Kabupaten Kepulauan Riau. Pembentukan Kabupaten Natuna, harus dibayar dengan lepasnya Kecamatan Tambelan yang menolak bergabung dengan Kabupaten Natuna karena merasa kepentingan mereka tidak diakomodir dalam pembentukan Kabupaten Natuna yaitu, letak Ibukota Kabupaten Natuna harus berada di Tambelan.

Sengketa penetapan letak Ibukota Kabupaten Natuna tidak hanya dipermasalahkan oleh Tambelan saja, Anambas pun pada waktu itu menuntut letak Ibukota Kabupaten Natuna harus berada di Kepulauan Anambas tepatnya di Kota Tarempa, sengketa dengan elit politik Anambas ini kemudian mampu diredam oleh elit politik Natuna dengan kompensasi Anambas akan menjadi prioritas utama pembangunan Kabupaten Natuna.

Seiring perjalanan waktu, janji perubahan dan kesejahteraan yang pernah diucapkan oleh elit-elit politik Natuna tak kunjung sampai merasa mempunyai kemampuan untuk berdiri sebagai daerah otonom maka, pada tahun 2002 masyarakat Kepulauan Anambas mendeklarasikan pembentukan BP2KKA yang merupakan alat perjuangan politik guna mencapai terbentuknya

Kabupaten Kepulauan Anambas, sampai pada tahun 2008 Kepulauan Anambas terbentuk menjadi kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna.

## **B. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Anambas**

### **1. Kondisi Geografis**

#### **a. Batas Wilayah**

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Tambelan;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

#### **b. Letak Geografis**

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Kabupaten Natuna, kawasan Kepulauan Anambas terdiri dari 175 gugusan Kepulauan dengan luas daratannya 966,6 km<sup>2</sup>. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada 1,30<sup>0</sup> sampai dengan 4,00<sup>0</sup> Lintang Utara dan 103<sup>0</sup> sampai dengan 107<sup>0</sup> Bujur Timur pada Skala 1: 175.000

dengan iklim tropis basah, temperature rata-rata terendah  $18^{\circ}\text{C}$  dan tertinggi  $27^{\circ}\text{C}$ .

**Tabel 4.1**

**Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Kecamatan**

KECAMATAN	LETAK GEOGRAFIS	
	LINTANG	BUJUR
Siantan	$3^{\circ}16'0.54''\text{N}$ $3^{\circ}11'49.06''\text{N}$	$106^{\circ}15'6.42''\text{E}$ $106^{\circ}9'14.91''\text{E}$
Siantan Selatan	$3^{\circ}11'34.16''\text{N}$ $2^{\circ}14'35.72''\text{N}$	$106^{\circ}16'43.99''\text{E}$ $105^{\circ}50'27.91''\text{E}$
Siantan Timur	$3^{\circ}11'50.12''\text{N}$ $2^{\circ}14'35.72''\text{N}$	$106^{\circ}48'58.08''\text{E}$ $106^{\circ}17'26.20''\text{E}$
Palmatak	$3^{\circ}54'49.39''\text{N}$ $3^{\circ}18'5.61''\text{N}$	$106^{\circ}45'15.02''\text{E}$ $105^{\circ}53'37.22''\text{E}$
Jemaja	$3^{\circ}36'27.33''\text{N}$ $2^{\circ}56'44.98''\text{N}$	$105^{\circ}45'0.32''\text{E}$ $105^{\circ}11'50.39''\text{E}$
Jemaja Timur	$2^{\circ}57'55.16''\text{N}$ $2^{\circ}10'2.81''\text{N}$	$105^{\circ}52'47.38''\text{E}$ $105^{\circ}16'39.64''\text{E}$
Siantan Tengah	$3^{\circ}17'53.81''\text{N}$ $3^{\circ}13'22.48''\text{N}$	$106^{\circ}45'4.59''\text{E}$ $106^{\circ}15'16.59''\text{E}$

*Sumber : Data Olahan dari Google Earth, 2009*

Ada 4 (empat) musim setiap tahunnya melanda Kepulauan Anambas yaitu, musim angin utara antara bulan Desember sampai dengan Februari, musim timur antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei, musim Selatan antara bulan Juni sampai dengan bulan

Agustus dan musim Barat antara bulan September sampai dengan

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas keseluruhan adalah  $\pm 590,14 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk  $\pm 31.341$  jiwa pada tahun 2004. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas keseluruhan adalah  $590,14 \text{ Km}^2$  terdiri dari 3% daratan perbukitan, gunung dan beberapa pantai pasir dan 97% merupakan wilayah lautan.

## **2. Kondisi Demografis**

### **a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk Kepulauan Anambas pada tahun 2001 berjumlah sebanyak 28.697 jiwa dengan rincian di Kecamatan Jemaja berjumlah 6.596 jiwa yang terdiri dari 3.422 jiwa laki-laki dan 3.174 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di dua kecamatan saat itu 26 jiwa/km<sup>2</sup> untuk Kecamatan Jemaja dan sebesar 32 jiwa/km<sup>2</sup> untuk Kecamatan Siantan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2005 sebesar 36.432 jiwa, dengan rincian 19.104 jiwa penduduk laki-laki dan 17.328 jiwa penduduk perempuan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada November tahun 2009 tercatat sebesar 60.992 jiwa. Penduduk asli Kabupaten Kepulauan Anambas adalah suku melayu dan suku laut

sebagian lainnya adalah pendatang (etnis Jawa, Sunda, Batak dan Minang). Jumlah KK Keseluruhan 15.248 KK, data jumlah penduduk ditampilkan pada Tabel 4-2.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Kecamatan**  
**Tahun 2009**

<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah KK</b>
Siantan	8.619	7.993	16.612	4.153
Jemaja	4.749	4.288	9.037	2.259
Palatak	8.060	6.986	15.046	3.762
Jemaja Timur	1.387	1.234	2.621	655
Siantan Selatan	2.778	2.557	5.335	1.334
Siantan Tengah	3.258	2.982	6.240	1.560
Siantan Timur	3.203	2.898	6.101	1.525
<b>Jumlah</b>	<b>32.054</b>	<b>28.938</b>	<b>60.992</b>	<b>15.248</b>

Sumber : *Diolah Hasil dan Tahun Kabupaten Kepulauan Anambas 2009*

## **b. Agama dan Tempat Ibadah**

Meskipun merupakan masyarakat melayu kepulauan agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas tidak homogen, sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam 90% dari total penduduk Kepulauan Anambas sedangkan sisanya merupakan pemeluk agama Kristen, Katolik dan Hindu.

Kegiatan ibadah penduduk Kepulauan Anambas dilakukan pada tempat-tempat atau rumah ibadah menurut data pada tahun 2005 terdapat 80 buah Masjid, 50 buah Surau atau Mushola, 5 buah Gereja dan 1 buah Kuil/Wihara.

Hampir seluruh daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki sarana ibadah baik masjid, surau maupun musholla. Namun demikian untuk gereja dan wihara hanya terdapat di Kecamatan Siantan atau Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas. Jumlah keseluruhan sarana ibadah di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 116 yang terdiri dari 78 Masjid, 30 Surau/Mushola, 7 Gereja dan 1 Kuil, Salah satu contoh kondisi sarana ibadah yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas ditunjukkan pada Gambar 4.2



**Tabel 4.3**  
**Sarana Ibadah Kabupaten Kepulauan Anambas**

<b>Lokasi</b>	<b>Mesjid</b>	<b>Surau/Mushola</b>	<b>Gereja</b>	<b>Wihara/Kelenteng</b>
Jemaja	12	9	-	-
Jemaja Timur	6	7	-	-
Siantan Selatan	14	3	2	-
Siantan	12	15	3	1
Siantan Timur	11	5	-	-
Siantan Tengah	6	-	1	1
Palmatak	23	5	1	-

*Sumber : Departemen Agama Kabupaten Natuna*

### **3. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kepulauan Anambas**

#### **a. Pendidikan**

Pendidikan merupakan media penting untuk mencerdaskan bangsa sehingga tingkat keberhasilan pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan tingkat pendidikan penduduk mempunyai arti penting dalam kemajuan pembangunan suatu daerah

Daerah yang tingkat pendidikan pendudukannya relatif tinggi relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah yang tingkat pendidikannya relatif rendah.

**Tabel 4.4**

**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak Sekolah	2.355 Jiwa
Tidak Tamat SD	11.995 Jiwa
Tamat SLTP/Sederajat	3.386 Jiwa
Tamatan SLTA/Sederajat	3.410 Jiwa
Tamatan Diploma 2 (D2)	5.16 Jiwa
Tamatan Diploma 3 (D3)	3.49 Jiwa
Tamatan Sarjana S1	3.49 Jiwa
Tamatan Pacsa Sarjana	4 Jiwa

*Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2005*

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas relatif rendah, hal ini tampak pada tingginya angka buta huruf dan angka putus sekolah, sedangkan untuk sarana pendidikan, khususnya

Sekolah Dasar hanya terdapat di dua Kecamatan yaitu Lameia dan

Tabel 4.5

## Sarana Pendidikan di Anambas pada setiap Kecamatan

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru	Lokal
<i>Kecamatan Jemaja</i>				
Taman Kanak-kanak	1 Buah	35 Jiwa	3 Jiwa	1
Sekolah Dasar Negeri	6 Buah	508 Jiwa	25 Jiwa	28
Sekolah Dasar Inpres	9 Buah	446 Jiwa	35 Jiwa	45
Madrasah/Swasta	2 Buah	98 Jiwa	5 Jiwa	3
SLTP	1 Buah	173 Jiwa	10 Jiwa	6
<i>Kecamatan Siantan</i>				
Taman Kanak-kanak	1 Buah	60 Jiwa	3 Jiwa	2
Sekolah Dasar Negeri	8 Buah	1.122 Jiwa	54 Jiwa	53
Sekolah Dasar Inpres	30 Buah	1.182 Jiwa	101 Jiwa	107
Madrasah/Swasta	1 Buah	149 Jiwa	6 Jiwa	4
SLTP	3 Buah	370 Jiwa	32 Jiwa	21
SLTP/Swasta	1 Buah	126 Jiwa	8 Jiwa	3
SLTA	1 Buah	141 Jiwa	14 Jiwa	6

## **b. Karakteristik Budaya**

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas bukanlah masyarakat yang homogen, meskipun suku melayulah yang dominan dan merupakan suku asli yang menempati Kepulauan Anambas, penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari beragam jenis suku antara lain suku Melayu, Padang, Kampar, Jawa, Bugis, Batak, dan etnis Tionghoa mereka umumnya para pendatang yang merantau berdagang menikahi suku asli yang memilih menetap di Kabupaten Kepulauan Anambas.

## **4. Kondisi Ekonomi dan Potensi Daerah**

Wilayah Kepulauan Anambas memiliki berbagai potensi yang luar biasa untuk di tumbuh kembangkan yang dapat menyerap seluruh tenaga kerja dan sekaligus mempercepat peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di kepulauan Anambas. Mengingat posisi Anambas berada pada 1,30<sup>0</sup>-4,00<sup>0</sup> Lintang Utara dan 103<sup>0</sup>-107<sup>0</sup> Bujur Timur pada skala 1:175.000 (Peta wilayah pulau-pulau Anambas Nomor.181 yang dikeluarkan oleh TNI AL bersama jawatan Hidro-Asianografi) maka wilayah Anambas berada pada jalur pelayaran internasional dan jalur

Kondisi tersebut berpeluang bagi Anambas untuk membuka berbagai peluang dan kerjasama antar Negara, selain itu Anambas juga memiliki berbagai sumber daya alam berupa Migas yang telah dieksplorasi dan eksploitasi oleh beberapa perusahaan asing dengan pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Pertamina.

Selain itu, Anambas juga memiliki berbagai potensi yang lain di antaranya:

**a. Peternakan**

Kondisi peternakan belum memberikan kontribusi secara signifikan pada penambahan nilai perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sistem peternakan masih secara tradisional. Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2007, ternak sapi banyak terdapat di Kecamatan Jemaja yakni sebanyak 387 ternak, begitu juga dengan ternak kambing. Namun sebaliknya, ternak unggas lebih banyak terapat di Kecamatan Palmatak, sedangkan Siantan Selatan lebih unggul pada ternak unggas itik. Data banyaknya ternak dan ternak unggas di Kabupaten Kepulauan Anambas ditampilkan pada Tabel 4.6

**Tabel 4.6**  
**Banyaknya Ternak dan Ternak Unggas Menurut**  
**Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2007**

Kecamatan	Ternak		Ternak Unggas	
	Sapi	Kambing	Ayam	Itik
Siantan	88	47	520	120
Siantan Selatan	107	97	721	280
Siantan Timur	109	105	600	200
Siantan Tengah	0	0	0	0
Palatak	284	186	18.517	210
Jemaja	387	372	10.037	192
Jemaja Timur	228	190	11.546	0

*Sumber : Natuna dalam Angka, 2007*

**b. Potensi Perikanan dan Kelautan**

Hampir 97% wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari lautan. Kondisi ini sangat mendukung bagi pengembangan usaha perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya perikanan. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya lebih memilih pembesaran ikan sebagai sektor utama dalam melakukan aktivitas perekonomian, terutama yang tinggal di kawasan pedesaan pada

umumnya memilih berdomisili di kawasan pantai dan sebagian besar bekerja sebagai nelayan.

Pada tahun 2009, jumlah nelayan baik yang bekerja sebagai penangkap ikan maupun pembudidaya ikan berjumlah 2.255 orang. Produksi perikanan tangkap sebanyak 300 ton dan produksi budidaya sebanyak 80 ton. Sementara, Luas baku lahan usaha budidaya tahun 2009 sebanyak 1.000 Ha dengan jumlah pembudidaya sebanyak 1.500 orang. Sementara untuk Pokaswas sebanyak 3 kelompok, sedangkan jumlah pabrik es sebanyak 3 unit. Hasil produksi perikanan tangkap selain perdagangan luar daerah, didistribusikan di pasar ikan/depo, jumlah pasar ikan/depo sebanyak 1 unit. Masyarakat nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas umumnya menggunakan perahu untuk menangkap ikan, baik perahu bermotor maupun perahu tanpa motor. Jumlah kapal motor yang di miliki adalah 2.606 unit dan perahu motor tempel sejumlah 16 Unit.

Data jumlah armada perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas serta kondisi jenis-jenis alat tangkap yang terdapat di Kabupaten

Tabel 4.7

**Jumlah Armada Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut  
Kecamatan Tahun 2007**

Kecamatan	PTM	MT	KM	KM $\geq$ 30 GT	Jumlah
Siantan	0	0	0	900	900
Siantan Selatan					
Siantan Timur					
Siantan Tengah	152	0	0	936	1.088
Palmatak					
Jemaja	443	0	0	416	859
Jemaja Timur					

*Sumber : Natuna dalam Angka, 2007*

Produksi perikanan tangkap lebih didominasi di daerah Palmatak dan Siantan Tengah yakni mampu mencapai 73.09 persen sedangkan untuk Siantan, Siantan Selatan dan Siantan Timur hanya mencapai 25.48 persen sementara untuk Jemaja dan Jemaja Timur hanya 1.43 persen. Sementara perikanan budidaya untuk semua daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki produksi yang hampir mendekati yakni berkisar antara 24 hingga 40 %. Data produksi perikanan di Kabupaten

Kepulauan Anambas ditampilkan pada Tabel 4.8



**Tabel 4.8**  
**Produksi Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas menurut**  
**Kecamatan Tahun 2006 (Ton)**

Kecamatan	Tangkap	Budidaya	Jumlah
Siantan	2.522,1	26.040	2.548,14
Siantan Selatan			
Siantan Timur			
Palatak	7.234,9	16.649	7.251,549
Siantan Tengah			
Jemaja	141,1	24.269	165,369
Jemaja Timur			

*Sumber : Natuna dalam Angka, 2006*

Sumber daya perikanan kelautan sangat tergantung dari pada kondisi terumbu karang yang dimiliki. Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari pulau-pulau baik kecil maupun besar dan perairan yang lebih luas tentunya akan sangat mempengaruhi kondisi terumbu karang. Hingga akhir tahun 2007 luas terumbu karang adalah 11.868,841 Ha. Kecamatan Siantan Selatan memiliki cakupan terumbu karang yang terluas dibandingkan dengan kecamatan lainnya, setelah itu Kecamatan Siantan Timur. Data luas terumbu karang di Kabupaten Kepulauan

**Tabel 4.9**  
**Luas Karang di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2007**

No	Kecamatan	Luas Karang (Ha)
1	Siantan	247,279
2	Jemaja	1.009,636
3	Palmatak	1.363,944
4	Jemaja Timur	1.833,30
5	Siantan Selatan	3.411,272
6	Siantan Tengah	1.309,20
7	Siantan Timur	2.694,21
	<b>Total</b>	<b>11.868,841</b>

*Sumber : RTRL Natuna, 2007*

**c. Perindustrian**

Untuk sektor perindustrian di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Industri Kecil dan Menengah meliputi industri kerajinan, industri bahan bangunan, industri pengolahan makanan, industri pengolahan perikanan & pertanian.

Sektor tersebut telah dikembangkan seperti usaha Kerupuk Ikan Tradisional, VCO, Pengrajin Busana dan Pengrajin Pompong Kayu, Perbenkelan, Pengrajin Souvenir. Jenis usaha kerajinan rumah tangga

pada tahun 2007 meningkat dari tahun sebelumnya yakni bertambah 7 jenis usaha, hal ini juga memberikan penambahan peluang bagi tenaga kerja.

**Tabel 4.10**

**Jumlah Usaha dan Tenaga Industri Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Kecamatan**

Kecamatan	2006		2007	
	Usaha	Tenaga Kerja	Usaha	Tenaga Kerja
Jemaja	52	103	54	107
Jemaja Timur	0	0	0	0
Siantan	52	125	55	131
Palmatak	31	67	32	69
Siantan Selatan	0	0	0	0
Siantan Timur	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	135	295	141	307

*Sumber : Natuna dalam Angka, 2007*

Jumlah usaha industri kecil dan tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas juga terjadi peningkatan. Pada tahun 2007, peningkatan terjadi hampir 50 persen dan mampu mempekerjakan sebanyak 48 orang tenaga kerja. Data jumlah usaha dan tenaga untuk

sektor industri kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas ditampilkan pada Tabel 4-11.

**Tabel 4.11**  
**Jumlah Usaha dan Tenaga Industri Kecil**  
**di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Kecamatan**

Kecamatan	2006		2007	
	Usaha	Tenaga Kerja	Usaha	Tenaga Kerja
Jemaja	1	10	2	12
Jemaja Timur	0	0	0	0
Siantan	4	29	7	30
Palmatak	0	0	1	6
Siantan Selatan	0	0	0	0
Siantan Timur	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>48</b>

*Sumber : Natuna dalam Angka, 2007*

#### d. Pertambangan

Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil memiliki potensi sumber daya alam mineral dan energi yang relatif cukup besar dan bervariasi baik berupa galian A (stratagis), bahan galian B (ritel) maupun bahan galian golongan C. Jenis

jenis bahan tambang yang bisa dijumpai di Kabupaten Kepulauan Anambas, antara lain : Minyak Bumi dan Gas Alam, Granit, Pasir, yang dijadikan sebagai sumber ekonomi. Cadangan Minyak Bumi dan Gas Alam yang besar di lepas pantai Kepulauan Anambas (Minyak Bumi sebesar 326,15 MMSTB dan Gas Alam 53,06 TSCF yang dimanfaatkan sebagai material bangunan. Kondisi eksisting pertambangan Migas offshore di Kabupaten Kepulauan Anambas.

**e. Potensi Perikanan yang terlepas**

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan informasi yang di dapat dari para nelayan lokal/asing dapat diprediksi peluang/potensi perikanan yang terlepas seharusnya menjadi pendapatan asli daerah masyarakat Anambas. Peluang dan potensi itu antara lain: ada sekitar  $\pm$  500 buah kapal asing/local selama ini beroperasi di laut Anambas, kapal-kapal tersebut berkapasitas rata-rata 70 ton yang hanya memerlukan 4 (empat) hari untuk memenuhi kapasitas tersebut.

**f. Perkebunan**

Meskipun Kabupaten Anambas adalah wilayah Kepulauan yang 97% adalah lautan, tidak berarti kehidupan penduduk hanya bergantung pada hasil laut, menurut sejarah yang ada banyak kapal-kapal yang singgah di pelabuhan Terampan untuk membeli barang-barang hasil

perkebunan seperti kelapa, cengkeh, karet, sagu dan rotan, sampai sekarang pun banyak penduduk yang menjadikan sektor perkebunan sebagai mata pencarian utama bagi mereka.

#### **g. Pariwisata**

Salah satu misi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menumbuhkan kembangkan kegiatan Industri dan Pariwisata yang berbasis kelautan. Oleh karenanya bidang pariwisata menjadi salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kabupaten Kepulauan Anambas kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah kawasan baik pulau-pulau kecil maupun besar. Objek wisata laut/pantai seperti Terumbu Karang di Kecamatan Jemaja. Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras dan Air Terjun Temurun. Wisata Bahari seperti Pulau Langok di Palmatak, Pantai Padang Melang di Kecamatan Jemaja dan Pulau Bawah di Kecamatan Siantan Selatan.

Guna mendukung pengembangan pariwisata, sektor perhotelan dan rumah makan/restoran juga perlu dikembangkan. Berdasarkan data tahun 2007 telah terdapat 11 hotel dan 33 rumah makan/restoran di Kabupaten

## 5. Sosial Politik

Partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi suatu daerah merupakan cerminan kondisi sosial politik daerah tersebut, tingkat partisipasi masyarakat di Kepulauan Anambas relatif tinggi, hal ini terlihat dari persentase masyarakat di kepulauan Anambas yang ikut dalam pemilihan daerah, pemilu Legislatif dan pemilu presiden kemarin, secara keseluruhan penduduk yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut mencapai angka 83,04% menggunakan hak pilihnya. Kehidupan politik di Kabupaten Kepulauan Anambas juga sangat baik masyarakat terbiasa saling menghargai satu sama lainnya dan menjunjung asas musyawarah untuk mufakat serta perwakilan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya organisasi dalam masyarakat yang pada awalnya merupakan media untuk masyarakat.

## C. Analisis

### 1. Analisis Faktor Syarat Administratif, Teknis, dan Fisik

#### a. Faktor Sosial Politik dan Sosial Budaya

Di dalam undang-undang otonomi daerah dijelaskan bahwa daerah memilih kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut pemerintah Propinsi Kepulauan Riau yang memegang teguh prinsip penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh/berkembang dalam masyarakat.

Realisasi pembentukan Kepulauan Anambas menjadi sebuah kabupaten tidak terlepas dari peran dan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh adat dan tokoh pemuda serta organisasi sosial politik yang bernaung dalam organisasi kemasyarakatan Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) pembentukan kabupaten ini juga mendapatkan dukungan dari kecamatan-kecamatan yang ada diwilayah Kepulauan Anambas dan Jemaja juga tokoh-tokoh masyarakat. "keinginan pemekaran wilayah Anambas menjadi kabupaten sendiri adalah merupakan aspirasi dari masyarakat yang kemudian



aspirasi ini dibawa oleh elit-elit lokal yang mempunyai kepentingan tertentu terlepas dari apapun kepentingan tadi, pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cita-cita bersama untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih mudah dibandingkan sebelumnya.

Melalui aspirasi masyarakat mengharapkan sistem pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat setempat akan semakin mudah dengan jarak rentang kendali yang semakin dekat, selain itu dengan dibentuknya kabupaten baru masyarakat setempat juga dapat ikut direkrut menjadi pegawai kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan memperhatikan tuntutan dan aspirasi yang berkembang dari masyarakat anambas yang didukung dengan kecamatan-kecamatan sekitarnya tentang keinginan peningkatan, pendekatan dan percepatan pelayanan masyarakat serta bentuk tanggung jawab pemerintahan Kabupaten Natuna untuk merespon dan menindaklanjuti pada tanggal 24 Januari 2006. Bupati Natuna Hamid Rizal segera mengeluarkan rekomendasi persetujuan terhadap pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas yang kemudian diteruskan kepada DPRD Kabupaten Natuna.

Sehubungan dengan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 25 Januari 2006 Komisi A DPRD kabupaten Kepulauan

natuna melaksanakan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait untuk membahas kemungkinan dan rencana pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2006 Komisi A DPRD melaksanakan kunjungan kerja ke lapangan dan beraudensi langsung dengan masyarakat Kecamatan Jemaja, Siantan dan sekitarnya dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Masyarakat anambas sangat berharap untuk dapat segera merealisasikan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna;
- 2) Agar kecamatan Midai dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pertimbangan bahwa letak Kecamatan Midai, Siantan, Jemaja, Palmatak berada pada koordinat lintang utara yang sama, serta memiliki prekuensi dan perdagangan, kontak sosial dan hubungan sejarah yang dominan dengan Kepulauan Anambas;
- 3) Agar ketiga gugusan wilayah Kepulauan Anambas diberi fungsi dan peluang masing-masing:
  - a) Siantan sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten (Tarempa), pengembangan pendidikan, Hankam, pelabuhan laut, perdagangan, perikanan, industry perkapalan, bandar udara internasional;

- b) Jemaja sebagai pusat pariwisata, perdagangan, pertanian dan industri;
  - c) Palmatak sebagai kawasan industri perikanan dan pertambangan.
- 4) Masyarakat Kecamatan Siantan, Jemaja, Palmatak dan sekitarnya bersedia bahu-membahu percepatan pelaksanaan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan hasil keputusan pertemuan tersebut DPRD Kabupaten Natuna kemudian pada tanggal 22 Maret 2006 mengeluarkan surat persetujuan tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas yang kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan pengkajian semua aspek yang akan dijadikan dasar kelayakan pemekaran Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten.

#### b. Faktor Hukum dan Pemerintahan

Pemekaran merupakan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan bukan sekedar sebuah kesempatan untuk membagi-bagikan kekuasaan dan ini didukung oleh undang-undang otonomi daerah tahun 1999 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang otonomi daerah tahun 2004

sehingga tidak ada alasan pihak manapun yang tidak menyetujui pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara garis besar disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian disebutkan juga pada BAB II tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagai peraturan perundangan pendukungnya adalah PP Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Menurut PP Nomor 78 tahun 2007 sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah kabupaten baru diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah penduduk minimal 10.000 jiwa;
- 2) Luas wilayah minimal 7,5 Km<sup>2</sup>;
- 3) Banyaknya kecamatan yang bergabung dalam pemerintahan

paling sedikit 5 (lima) kecamatan

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas melibatkan beberapa kecamatan yang berada pada koordinat lintang utara yang sama yaitu:

- 1) Kecamatan Siantan;
- 2) Kecamatan Siantan Timur;
- 3) Kecamatan Siantan Selatan;
- 4) Kecamatan Jemaja;
- 5) Kecamatan Jemaja Timur; dan
- 6) Kecamatan Palmatak.

Keputusan akhir menetapkan apabila Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk akan membawahi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah penduduk  $\pm 41.341$  jiwa dan luas wilayah  $\pm 590.14 \text{ Km}^2$ . Oleh karena itu persyaratan pembentukan kabupaten baru yang dibekukan melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Propinsi Kepulauan Riau sudah memenuhi kriteria kelayakan. Sehingga dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas maka di Propinsi Kepulauan Riau terjadi perubahan administrasi pemerintahan kewilayahan 6 (enam) kabupaten menjadi 7

c. Faktor Luas Rentang Kendali

Pembentukan Anambas sebagai kabupaten baru merupakan hasil sebuah kajian panjang dari hasil kajian menyimpulkan letak Kabupaten Kepulauan Anambas yang cukup jauh dari kabupaten induknya membuat masyarakat Anambas rentang kendali pemerintahan menjadi lebih sulit sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lemah.

Maka dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas masyarakat merasa senang karena jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengurus segala sesuatu, kecamatan yang bergabung kedalam Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya memiliki jarak tempuh yang relatif dekat bila dibandingkan dengan jarak antara kecamatan-kecamatan yang ada di gugusan Kepulauan Anambas sebelum dibentuk menjadi kabupaten.

Jarak tempuh bukanlah satu-satunya indikator tingkat pelayanan namun tidak bisa dipungkiri bahwa jarak tempuh mempunyai signifikansi dan berpengaruh terhadap tingkat mobilitas rasa enggan sering muncul pada warga masyarakat untuk mengurus berbagai hal yang terletak di ibukota kabupaten, karena pertimbangan jarak tempuh, waktu dan biaya

Keberadaan suatu kabupaten tentu akan selalu di sertai kelengkapan persyaratan, setidaknya kelengkapan persyaratan minimal, kelengkapan dimaksud seperti lembaga pemerintahan, sarana dan prasarana pemerintah, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat lainnya, seperti sarana pendidikan, perekonomian dan lain-lain, dengan terbentuknya kabupaten baru, maka akan menimbulkan sejumlah dampak positif bagi masyarakat diwilayahnya dan pemerintah daerah pada umumnya.

#### d. Faktor Potensi Daerah

Untuk dapat mengemban amanat otonomi daerah maka suatu daerah sangat diharapkan dapat mengemban potensi daerah yang dimilikinya, potensi daerah didefinisikan sebagai daya, kemampuan atau kekuatan yang belum terjadi atau masih memiliki kemungkinan untuk dikembangkan.

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diibaratkan menggali harta karun yang terpendam dengan kekayaan laut melimpah ruah yang kemudian dijabarkan secara konseptual yang tertuang dalam empat aspek pemanfaatan utama antara lain:

- 1) Laut sebagai sumber pangan manusia;

- 2) Laut sebagai sumber energi dan bahan dasar;

- 3) Laut sebagai media perkembangan;
- 4) Laut sebagai media pertahanan dan keamanan.

e. Faktor Syarat Administratif

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB II Pasal 5 tentang pembentukan daerah kawasan khusus secara garis besar menyebutkan faktor syarat adanya persetujuan dan rekomendasi dari pemerintah.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna nomor KPTS.05/DPRD/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas, surat Bupati Natuna Nomor 125/PEM/22/2006 tanggal 27 Januari 2006 perihal persetujuan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas serta keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi Kepulauan Riau nomor 04/kpts-DPRD/160/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang persetujuan Dewan Perwakilan daerah propinsi Kepulauan Riau terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas, surat Gubernur Propinsi Kepulauan Riau nomor 0040/Kdh/kenri 135/02.07 tanggal 5 Februari 2007 perihal



usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna nomor 25/DPRD/II/2007 tanggal 8 Februari 2007 perihal penetapan ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna nomor 21/SID-RIS/DPRD/2007 tanggal 3 Februari 2007 perihal penyiapan alokasi dana untuk pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna nomor 14/DPRD/07 tanggal 25 juni 2007 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna terhadap penetapan ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna terdiri atas 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan dan Kecamatan Siantan Timur

f. **Pertahanan dan Keamanan**

Merupakan faktor ketahanan wilayah yang diukur dengan karakter wilayah dari ketersediaan jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah dan karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan, secara geografis wilayah Kabupaten Natuna telah dibagi dalam dua klaster, yakni klaster pulau-pulau rumpun Natuna dan klaster pulau-pulau Anambas sudah seharusnya ada dua kabupaten yang mengurus masing-masing rumpun pulau tersebut.

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas bisa mengurangi masalah illegal fishing kapal pukat harimau asal Vietnam dan Thailand demi menjaga kedaulatan NKRI Kabupaten Kepulauan Anambas bisa menjamin kedaulatan dan ini suatu kebutuhan yang harus segera direalisasikan secepatnya, Anambas yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga juga mejadi alasan kuat daerah ini harus berdiri sendiri.

Saat ini kedaulatan NKRI di Anambas hanya di jaga oleh Lanal TNI AL Tarempa, dengan jumlah 1 Pleton Marinir, dan Koramil sementara melihat letak geografis Kepulauan Anambas yang bebatasan langsung dengan Negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia dan China tentu saja sangat mengkhawatirkan. Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas maka kedaulatan pertahanan dan keamanan NKRI

di ujung utara Indonesia bisa terjaga dengan baik, didukung oleh personil keamanan yang memadai.

## 2. Latar Belakang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas

Gagasan pemekaran daerah sering dibangun karena adanya dorongan untuk merepresentasikan identitas kultur, yakni identitas yang berlandaskan pada realitas perbedaan kelompok pulau, latar belakang etnik terutama bahasa, serta latar belakang pemerintahan tradisonal.

Kondisi Kepulauan Anambas setelah dimekarkan menjadi Kabupaten, hampir sama keadaanya dengan terbentuknya propinsi Kepulauan Riau tahun 2004 yang lalu terdapat beberapa kesamaan yang kebetulan, saat itu perangkat Pemprov belum selengkap sekarang, ketika Ismeth Abdullah mulai memimpin Kepulauan Riau saat itu pun belum ada perangkat daerah yang lengkap, bersama Sekdaprov Kepulauan Riau Said Jaafar dan beberapa staf di biro keuangan, Ismeth harus bekerja keras untuk mengemis anggaran ke pemerintah pusat sebagai konsekuensi logis menuntut berpisah dari Propinsi Riau yang saat itu dipimpin oleh Rusli Zainal yang enggan memberikan bantuan kepada Kepulauan Riau sebagai protes keberatan pemisahan Kepulauan Riau.

Pada masa-masa awal Kepulauan Riau memang hidup dari belas kasiahan pusat namun Kepulauan Riau berhasil membuat APBD mini, sebelum akhirnya setahun kemudian mulai mempunyai APBD sendiri, begitu pun jika dilihat pada

awal tahun 2000 berbagai daerah hasil pemekaran di Kepulauan Riau lainnya seperti Karimun, Lingga, Natuna, Bintan dan yang lainnya.

Pasca satu tahun pemekaran Anambas menjadi Kabupaten Kepulauan Anambas hal yang paling mencuat kepermukaan adalah kesibukan pemerintah daerah dalam menata segala macam tetek bengek pemerintahan, perangkat kerja, pengisian formasi pegawai, termasuk sewa kantor pemerintahan.

Melihat berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh kabupaten Kepulauan Anambas maka dalam satu atau dua tahun kedepan masyarakat tidak usah terlalu berharap bahwa cita-cita perjuangan membentuk Kabupaten Anambas guna mencapai pemerataan pembangunan dan mensejahterakan rakyat bakal terwujud di pulau paling utara Indonesia itu dalam waktu cepat.

Seolah ingin membantah argumentasi bahwa pemekaran daerah hanya untuk kepentingan elit saja, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus bergegas membenahi daerahnya. Kabupaten Kepulauan Anambas yang dipimpin oleh Plt Bupati Tengku Mukhtarudin telah berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan daerah dengan merekrut para PNS dari kabupaten induk Natuna, maupundari kabupaten/kota lainnya di Propinsi Kepulauan Riau. Bahkan pada Desember 2008 lalu pemerintah daerah setempat telah merekrut 100 orang pegawai honorer untuk ditempatkan diberbagai instansi pemerintah

Pencapaian kemajuan juga meliputi bidang kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah membebaskan biaya pengobatan bagi seluruh warga Anambas, sedang dalam bidang pendidikan rencananya akan segera dibangun gedung baru untuk SMAN 1 Siantan. Terobosan yang telah sejak lama dinantikan, namun hamper luput dari perhatian Pemkab Natuna dulu sedang dalam bidang administrasi kependudukan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas membebaskan biaya pengurusan KTP bagi masyarakat, dalam teknologi informasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas membebaskan saluran internet yang dipasang di kantor-kantor pemerintah di ibukota Terempa, sehingga kini warga Terempa bisa memanfaatkan saluran tersebut untuk koneksi internet di tempat-tempat tertentu.

### **3. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas**

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain, dan Daerah Otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai dengan perkembangan daerah. Munculnya gejala, bahkan kenyataan akan adanya pemekaran dan pembentukan Kabupaten, Kota, dan Provinsi baru di

Indonesia menuntut perlunya segera ditetapkan syarat-syarat dan kriteria yang menjadi pertimbangan di dalam pembentukan dan pemekaran daerah.

Pemerintah telah menetapkan tata cara pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tersebut diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 itu juga tercantum proses pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

1. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah.

2. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi,

potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kepadudukan, luas

daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.

3. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Dengan persyaratan yang dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna tercapainya kemakmuran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat dilihat pada beberapa bagian antara lain:

- a. **Kemampuan Ekonomi**

Kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas, yang pertumbuhan ekonominya dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Penerimaan Daerah Sendiri (PDS), tinggi rendahnya tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah biasanya diukur dengan besar kecilnya PDRB per kapita yang mana pada Kabupaten Kepulauan Anambas atas dasar harga konstan terlihat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pada tahun 2001 sebesar Rp

465.791,64 juta kemudian naik pada tahun 2005 menjadi Rp. 581.761,12 juta.

Kabupaten Kepulauan Anambas yang baru terbentuk hanya memperoleh Pendapatan Asli Daerah murni saja tanpa bagi hasil pajak dalam arti Kabupaten Kepulauan Anambas tidak perlu mengandalkan sektor minyak dan gas untuk berdiri sendiri dengan perekonomian yang meningkat, kabupaten Kepulauan Anambas cukup mengandalkan potensi laut yang luar biasa kayanya dari hasil penelitian volume penangkapan ikan secara tradisional saja mencapai Rp. 314.526.000.000,- belum lagi apabila potensi laut yang terleaps dimanfaatkan dengan baik, maka Kabupaten Kepulauan Anambas berpeluang mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat di setiap tahunnya akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan identifikasi kemampuan ekonomi tersebut kondisi sarana dan prasarana perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat meningkat disebabkan peningkatan sarana dan prasarana tersebut menjadi faktor penunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga tersedianya kebutuhan ekonomi masyarakat sudah dapat diatasi dengan baik demi terciptanya kesejahteraan pada masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan



## **b. Potensi Daerah**

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam dengan jumlah yang cukup banyak, potensi sumber daya alam tersebut merupakan suatu modal dasar pembangunan daerah apabila dikelola secara baik, baik yang berupa sumber daya lahan, sumber daya air maupun sumber daya mineral.

Dengan mengemban amanat otonomi daerah maka suatu daerah sangat diharapkan dapat memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya, potensi sendiri di defenisikan sebagai daya, kemampuan atau kekuatan yang belum terjadi atau masih memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diibaratkan mengali harta karun yang terpendam, dengan kekayaan laut melimpah yang kemudian dijabarkan secara konseptual yang tertuang dalam 4 (empat) aspek pemanfaatan utama antara lain:

- a. Laut sebagai sumber pangan manusia;
- b. Laut sebagai sumber energi dan bahan dasar;
- c. Laut sebagai media perkembangan;
- d. Laut sebagai media pertahanan dan keamanan.

Sehingga masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas sangat tidak tergantung dengan masalah minyak dan gas yang terkandung dalam laut

Kabupaten Kepulauan Anambas karena dalam beberapa tahun kedepan

kekayaan minyak dan gas akan segera habis sehingga masyarakat kosentrasi pada kekayaan hasil laut.

**c. Sosial Budaya**

Bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya sejak awal telah memiliki corak budaya yang dikenal luas yaitu nilai-nilai budaya tersebut sudah mengkristal di masyarakat dan merupakan suatu kekuatan perekat dalam menjaga keutuhan hidup bermasyarakat dan bernegara, juga dalam rangka memacu pembangunan daerah.

Di kawasan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat kita jumpai berbagai jenis kesenian adat daerah yang masih terus dibina dan dikembangkan seperti tarian adat kebesaran dan kesenian adat lainnya yang senantiasa dapat memberi ciri tersendiri dalam memperkaya khasanah budaya nasional.

Pembangunan sosial budaya yang bertujuan untuk pembangunan yang berindikasi membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disamping itu dari data-data yang ada menunjukkan masih banyaknya potensi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat dikelola yang sekaligus menjadi kelebihan dan peluang pembangunan untuk meningkatkan kualitas aklak, etika, moral dan kualitas intelektual serta kecerdasan agar memiliki kepribadian yang

sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai luhur budaya bangsa telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Perkembangan sosial budaya Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dalam statistik sosial menunjukkan adanya peningkatan seperti dibangunnya tempat peribadatan seperti Masjid dan Musholla yang tersebar di semua desa/kelurahan karena mayoritas penduduk beragama islam. Kemudian itu, pembangunan tempat sosial tercermin dari tempat jumlah pertunjukan seni diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas tersedia sebanyak 13 unit dengan rasio sebesar 3,145 untuk menampung kegiatan seni masyarakat, sedangkan jumlah gedung seni di wilayah Kabupaten induk tersedia sebanyak 25 unit atau mencapai rasio sebesar 4.109 yang mana pembangunan rata di setiap kabupaten.

Adapun kondisi lain yang berkaitan dengan sosial budaya adalah dibangunnya sarana olah raga untuk pemanfaatan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dimekarkan memiliki sarana olahraga yaitu sebanyak 80 unit atau dengan rasio sebesar 19.351 dan sebanyak 140 unit dengan rasio sebesar 23.010 per 10.000 penduduk untuk Kabupaten induknya. Sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi persyaratan minimal

#### **d. Sosial Politik**

Dalam Undang-undang otonomi daerah dijelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut Pemerintah Kepulauan Riau yang memegang teguh prinsip penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh/berkembang dalam masyarakat.

Realisasi pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi sebuah kabupaten tidak terlepas dari peran dan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda serta organisasi social politik yang bernaung dalam organisasi kemasyarakatan Badan Pembentukan dan Penyelarasan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) pembentukan kabupaten ini juga mendapatkan dukungan dari kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kepulauan Anambas dan Jemaja juga tokoh-tokoh masyarakat. "Keinginan pemekaran wilayah Anambas menjadi Kabupaten sendiri adalah merupakan aspirasi dari masyarakat, yang kemudian aspirasi ini dibawa oleh elit-elit lokal yang mempunyai kepentingan tertentu, terlepas dari apapun kepentingan tadi, pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cita-cita

bersama untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih mudah dibandingkan sebelumnya”.

Melalui aspirasi masyarakat mengharapkan sistem pelayanan admintrasi pemerintahan kepada masyarakat setempat akan semakin mudah dengan jarak rentang kendali yang semakin dekat, selain itu dengan dibentuknya kabupaten yang baru, masyarakat setempat juga dapat ikut direkrut menjadi pegawai kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu bentuk aspirasi masyarakat adalah dengan melakukan musyawarah dan membentuk panitia pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas melalui pemekaran Kabupaten Natuna, aspirasi dan dukungan untuk mewujudkan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas disampaikan kepada Pemerintah Daerah (Bupati dan Ketua DPRD) Kabupaten Natuna pada tanggal 20 Januari 2006 oleh Badan Pembentukan dan Penyelarasan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA).

Dengan memperhatikan tuntutan dan aspirasi yang berkembang dari masyarakat Anambas yang didukung dengan kecamatan-kecamatan sekitarnya tentang keinginan peningkatan, pendekatan, dan percepatan pelayanan masyarakat serta bentuk tanggung jawab pemerintah Kabupaten Natuna maka untuk merespon dan menindaklanjuti dan segera

menunggu rekomendasi persetujuan terhadap pemekaran Kabupaten Anambas.

**e. Jumlah Penduduk**

Kependudukan merupakan faktor yang diukur dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2005 sebesar 41.341 jiwa, dengan tingkatan pertumbuhan penduduk 2% per tahun.

Melihat angka pertumbuhan penduduk yang apabila disandingkan dengan luasnya wilayah yang hampir 97% adalah lautan, maka faktor ini pun memenuhi syarat pemekaran Kepulauan Anambas menjadi kabupaten. Kemudian berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 5 menyatakan bahwa cakupan wilayah untuk pembentukan Kabupaten baru adalah 5 (lima) kecamatan, dengan demikian hal nya juga jumlah penduduk memperhatikan jumlah penduduk rata-rata kecamatan hal ini mengindikasikan bahwa dari keberadaan jumlah penduduk, pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas berada di garis persyaratan minimal yang di persyaratkan.

Banyaknya jumlah penduduk diatas, jelas merupakan aset sekaligus potensi bagi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kan

ekonomi daerah titik sentralnya adalah bagaimana mengunayakan

terjadinya pemberdayaan sumber daya manusia yang akan lebih efektif jika dikelola dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas.

**f. Luas Daerah**

Luas daerah merupakan faktor yang terukur lewat luas wilayah secara keseluruhan dan luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan, luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas keseluruhan  $\pm 59,014.00$  Ha terdiri dari 3% daratan perbukitan, gunung dan beberapa pantai pasir dan 97% merupakan wilayah lautan.

Kultur masyarakat melayu pesisir menjadikan masyarakat Anambas kreatif dan survive dalam memanfaatkan keterbatasan wilayah daratan, kebanyakan masyarakat mendirikan rumah mereka dipesisir pantai, sehingga Anambas terbentuk menjadi kota pelabuhan, ada 3% wilayah daratan Anambas merupakan wilayah yang bias dimanfaatkan untuk lokasi pusat pemerintahan dan perkantoran dan secara kebetulan sebagian besar terletak di Kota Tarempa.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan wilayah lautan yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam sehingga berpotensi menjadi ancaman dalam kerangka Negara Kesatuan Wilayah Republik Indonesia, sebagai pulau terluar memberikan konsekuensi perbatasan wilayah laut yang kurang jelas juga, yang sangat berpotensi terhadap illegal fishing yang dilakukan oleh kapal kapal penangkapan ikan Negara

asing. Masyarakat Kepulauan Anambas yang bekerja sebagai nelayan sangat dirugikan dengan keberadaan kapal-kapal asing yang memiliki peralatan penangkapan yang lebih canggih.

Dengan demikian pembentukan calon Kabupaten Anambas ini diperkirakan dapat member dan mempermudah motivasi meningkatkan semangat kebangsaan di tengah-tengah masyarakat, karena bagaimana pun juga kehadiran sebuah daerah otonom baru akan diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana serta instansi vertikal. Maka pembentukan calon Kabupaten Kepulauan Anambas yang wilayahnya sebagi pulau terluar dapat menjadi pertimbangan tersendiri untuk dijadikan sebuah daerah otonom



**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis pandang perlu sehubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Untuk lebih mendukung kelancaran pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas, hendaknya pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri dengan berdasarkan aspirasi masyarakatnya.
2. Dalam rangka mendukung kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaan otonomi daerah, hendaknya pemerintah pusat sepatutnya mengurangi campur tangan terutama dalam hal-hal teknis, pada daerah yang baru terbentuk khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas. Agar dapat memacu inisiatif dan kreatifitas jajaran pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengurus rumah tangga daerahnya.